

DAMPAK KEKUASAAN PADA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERILAKU MANAJERIAL

Supartini

Supartini89@ymail.com

Universitas Pembangunan Surakarta

Jl Walanda Maramis no 31 Cengklik Surakarta

ABSTRACT

Local Financial Information System (SIKD) can give the beeter information for the decision making of strategic specially relate to transparency and accountability in public sector. This research aim to test influence of formal authority, informal authority, characteristic of SIKD to managerial behaviour. Decision management, decision control, and cost consciousness proction by managerial behaviour. Analysis of is hypothesis examination used by technique SEM with the program LISREL 8.54. The result of this research indicate that formal authority have an effect on positive to the usefulness of SIKD for decision management, but does not have an effect on positive for decision control. Informal authority does not have an effect on negative to the usefulness of SIKD for decision management. Informal authority have an effect on negative to the usefulness of SIKD for decision control. Characteristic of SIKD does not have an effect on positive to the usefulness of SIKD for decision management and decision control. The usefulness of SIKD for decision management and decision control does not have an effect on positive to cost consciousness.. Formal authority have an effect on direct positive to cost consciousness. Informal authority does not have an effect on direct negative to cost consciousness.

Keyword : Formal authority, informal authority, characteristic of SIKD, decision management, decision control, cost consciousness

ABSTRAK

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis khususnya berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh wewenang formal, otoritas informal, karakteristik SIKD dengan perilaku manajerial. Keputusan manajemen, kontrol keputusan, dan biaya consciousness proction oleh perilaku manajerial. Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan teknik SEM dengan program LISREL 8.54.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wewenang formal memiliki pengaruh positif untuk kegunaan SIKD untuk manajemen keputusan, tetapi tidak memiliki pengaruh positif untuk kontrol keputusan. Otoritas informal tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kegunaan SIKD untuk manajemen keputusan. Otoritas informal berpengaruh negatif terhadap kegunaan SIKD untuk kontrol keputusan. Karakteristik SIKD tidak memiliki pengaruh positif untuk kegunaan SIKD untuk manajemen keputusan dan kontrol keputusan. Kegunaan SIKD untuk manajemen keputusan dan kontrol keputusan tidak memiliki pengaruh positif untuk *cost consciousness*. Kewenangan formal memiliki pengaruh positif langsung untuk *cost consciousness*. Otoritas informal tidak memiliki pengaruh negatif langsung untuk *cost consciousness*

Kata kunci: Otoritas formal, otoritas informal, karakteristik SIKD, keputusan manajemen, kontrol keputusan, *cost consciousness*

PENDAHULUAN

Agar organisasi pemerintah daerah dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas yang baik dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai. Sistem informasi yang dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan. Salah satunya adalah tuntutan dan kebutuhan akan **Sistem Informasi Keuangan Daerah** yang memadai yang disingkat **SIKD**.

Model rancangan SIKD yang sedang diimplementasikan saat ini adalah rancangan SIKD baru di era otonomi. Model rancangan SIKD berbasis pada model kekuasaan terdesentralisasi. Pengguna SIKD tidak hanya Kepala Daerah, bahkan memungkinkan dan mengharuskan para manajer pemerintah (perangkat) daerah (Kepala Badan, Kantor, Dinas, dan unit lainnya). Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil keputusan penganggaran, namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah (Syafuddin, 2006). Kepala Daerah dan Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Unit lainnya disebut sebagai **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa struktur otoritas formal merupakan anteseden dari penggunaan SIA (Abernethy & Lillis, 2001) namun belum menjelaskan peran kekuasaan dalam hubungan antara penggunaan SIKD dengan perilaku organisasional manajer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak kekuasaan yang melekat pada diri pimpinan SKPD pada penggunaan SIKD dalam manajemen keputusan dan kontrol keputusan, dan faktor perilaku manajerial.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Abernethy dan Emidia, *Power, Organization Design and Managerial Behaviour* (2004). Penelitian tersebut menggunakan sampel 56 dokter yang bekerja sekaligus sebagai manajer pada sebuah rumah sakit Universitas terbesar di Italia.

Perbedaan penelitian ini dengan Abernethy dan Emidia (2004) adalah objek yang digunakan pada penelitian ini adalah pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar dan sampel yang digunakan adalah Sekretariat Daerah, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Bidang. Pemilihan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar sebagai objek dari studi ini didasarkan pada

pertimbangan, bahwa sekalipun peran pemerintah daerah lebih fokus pada masalah pembangunan secara keseluruhan di daerah, namun apa yang dilakukan itu selalu bersentuhan dengan masalah APBD. Itu berarti, selain masalah kekuasaan (baik formal maupun informal), karakteristik sistem informasi keuangan daerah juga sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Kewenangan formal dan informal dapat dilihat pada struktur organisasi yang terdapat pada organisasi privat maupun publik. Dua konstruk kewenangan tersebut bersumber dari dua hal yang berbeda. Kewenangan formal bersumber dari keputusan yang didelegasikan oleh atasan kepada para bawahan (Bernard, 1968 dalam Abernethy dan Emidia, 2004) dan kewenangan informal bersumber dari kekuasaan individu dalam suatu organisasi (Kotter, 1985 dalam Abernethy dan Emidia, 2004; Alexander dan Morlock, 2000), yang berpengaruh pada penggunaan SIA oleh manajer untuk mengelola perusahaan. Sedangkan, karakteristik informasi dalam sistem akuntansi digunakan untuk mengendalikan perilaku manajer dan pengambilan keputusan yang tepat (Antony, 1965 dalam Abernethy dan Emidia, 2004; Chenhall dan Moris, 1986 dalam Abernethy dan Emidia, 2004; Bowens dan Abernethy, 2000).

Pemilihan desain sistem informasi juga berdampak penting pada biaya sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Penilaian keputusan yang bersumber dari kewenangan formal atas input dan output berpengaruh pada komitmen dan tujuan sistem yang dihubungkan dengan efisiensi biaya (Sterr, 1977 dalam Abernethy dan Emidia, 2004), sedangkan kewenangan informal yang diperoleh melalui kekuasaan kemungkinan mempunyai pengaruh negative pada kepedulian berbiaya (*cost consciousness*) (Weiner et al., 1987 dalam Abernethy dan Emidia, 2004).

Penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh struktur kewenangan (kewenangan formal dan kewenangan informal) dan karakteristik SIKD terhadap perilaku manajerial. Perilaku manajer diprosikan dengan pengendalian keputusan, manajemen keputusan dan *cost consciousness* seperti yang dilakukan oleh Abernethy dan Emidia (2004). Penelitian ini akan mengkaji apakah fenomena tersebut terjadi di Indonesia, khususnya pada Pemda Kabupaten Karanganyar. Hal ini didasari bahwa sentralistik masih melekat, meskipun jiwa otonomi daerah yang terkandung dalam UU 32/2004 adalah desentralisasi. Secara konkrit pengaruh kewenangan (kewenangan formal dan kewenangan informal) dan karakteristik SIKD, sangat terlihat pada perilaku Kepala Daerah/Badan/Kantor/Dinas dalam pengambilan keputusan dan pengendalian keputusan. Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Apakah struktur kewenangan formal berpengaruh terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan dan manajemen keputusan.
2. Apakah struktur kewenangan informal berpengaruh terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan dan manajemen keputusan
3. Apakah karakteristik SIKD berpengaruh terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan dan manajemen keputusan.
4. Apakah penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan dan manajemen keputusan berpengaruh terhadap *cost consciousness*.
5. Apakah struktur kewenangan formal berpengaruh langsung terhadap *cost consciousness*.
6. Apakah struktur kewenangan informal berpengaruh langsung terhadap *cost consciousness*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah studi eksplorasi (*exploration studi*). Studi eksplorasi adalah untuk memahami fenomena atau masalah yang diteliti, karena belum banyak literature hasil penelitian yang membahas masalah tersebut atau masalah sejenis (Nur Indriantoro dan Mambang Supomo, 2002). Studi ini diperlukan untuk menjajaki sifat dan fenomena dari pengaruh kekuasaan dan desaian organisasi tersebut terhadap perilaku manajer. Sejumlah Hipotesis dikemukakan untuk menjawab fenomena tersebut dengan menggunakan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi fenomena yang diteliti.

Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi Penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar sebagai tempat berada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai dan cocok dengan tujuan penelitian. Pimpinan SKPD sejak tahun 2000-an hingga saat ini menghadapi situasi dan kondisi yang sesuai dengan maksud penelitian yaitu, adanya berbagai peraturan yang menimbulkan munculnya model penggunaan SIKD serta keharusan untuk menyadari kepedulian mereka terhadap efisiensi dan efektifitas realisasi *cost*. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus merupakan metode pemilihan sampel dari semua elemen populasi.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan. Data dikumpulkan dengan

mengirim kuesioner melalui (*contact person*) dengan menjadikan individu sebagai jaringan untuk menyebarkan kuesioner pada responden yang lain. Kuesioner yang dikelola secara personal adalah cara baik untuk mengumpulkan data. Kuesioner yang dikelola secara pribadi paling baik apabila data dikumpulkan dari organisasi-organisasi yang terletak berdekatan satu dengan yang lain. Cara ini dilakukan untuk mengharapkan tingkat pengembalian (*respon rate*) kuesioner yang tinggi (Sekaran, 1992).

Kusioner didesain terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi deskripsi responden yang merupakan uraian responden secara demografis. Bagian kedua berisi instrumen pertanyaan yang menkonstruksi variabel penelitian, yang berupa pertanyaan dengan jawaban menggunakan skala Likert (1 sampai 5).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Terdapat 6 (enam) variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu struktur kewenangan formal, kewenangan informal, karakteristik informasi, pengendalian keputusan, manajemen keputusan dan *cost consciousness*.

1). Struktur Kewenangan Formal

Struktur kewenangan formal didefinisikan sebagai suatu pilihan yang sengaja diambil manajemen puncak untuk mendelegasikan tipe keputusan ke manajemen tingkat yang lebih rendah dan biasanya terkait dengan sistem pertanggungjawaban. Struktur kewenangan format diukur dengan menggunakan tiga instrument dari Govindarajan (1988). Instrument kewenangan formal terdiri dengan tiga pertanyaan, yang didesain untuk mengungkap keputusan yang tepat untuk didelegasikan kepada para manajer. Skala likert 1 sampai 5 digunakan untuk menunjukkan respon dari kewenangan formal (1 = tidak setuju sampai 5 = sangat setuju).

Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin tinggi kewenangan formal.

2). Struktur Kewenangan Informal

Struktur kewenangan informal dapat dilihat dari pengaruh mereka pada pengambilan keputusan strategis. Kewenangan informal Pada tahap ini manajer sering menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka tanpa adanya sanksi apapun. Pengukuran kekuasaan manajer dan pengaruh mereka dalam perusahaan diukur dengan enam pertanyaan Succi et al (1998). Skala Likert 1 sampai 5 digunakan untuk menunjukkan respon dari kewenangan informal (1 = sangat kecil sampai 5 = sangat besar). Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin besar kewenangan informal.

3). Karakteristik SIKD

Karakteristik SIKD terkait dengan pimpinan SKPD memperkirakan ketelitian, relevansi, ketepatan waktu dan format informasi yang dihasilkan SIKD. Karakteristik SIKD diukur dengan menggunakan sembilan instrument dari Doll dan Torkzadeh (1988) Skala Likert 1 sampai 5 digunakan untuk menunjukkan respon karakteristik SIKD (1= sangat tidak pernah sampai 5 = sangat sering). Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin sering penggunaan SIKD.

4). Manajemen Keputusan

Manajemen keputusan merupakan perilaku manajer yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi yang dapat ditelaah dengan melihat sampai sejauh mana keberadaan informasi anggaran digunakan untuk manajemen keputusan (Swieringa dan Moncur, 1975 dalam Abernethy dan Emidia, 2004). Untuk mengukur variable penggunaan SIKD oleh kepala daerah dan pimpinan SKPD dalam manajemen keputusan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Swieringa dan Moncur, 1975 (Swieringa dan Moncur, 1975 dalam Abernethy dan Emidia,

2004). Ada empat jenis pertanyaan berkaitan dengan penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan. Instrument manajemen keputusan ditunjukkan dengan skala likert 1 sampai 5 (1 = sangat kecil sampai 5 = sangat besar). Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin besar peran keputusan manajemen.

5). Pengendalian Keputusan

Pengendalian keputusan merupakan perilaku manajer yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi dapat ditelaah dengan melihat sampai sejauh mana keberadaan anggaran dapat digunakan untuk pengendalian keputusan (Swieringa dan Moncur, 1975 dalam Abernethy dan Emidia, 2004). Empat pertanyaan digunakan untuk mengukur penggunaan SIKD oleh kepala daerah dan pimpinan SKPD dalam pengendalian keputusan (Swieringa dan Moncur, 1975 dalam Abernethy dan Emidia, 2004). Skala Likert 1 sampai 5 digunakan untuk menunjukkan respon dari criteria SIKD untuk pengendalian keputusan (1 = sangat sulit sampai 5 = sangat mudah). Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin mudah peran pengendalian keputusan.

6). Cost Consciousness

Cost conciousness merupakan kondisi dimana manajer sangat menyadari tentang arti penting biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam setiap pengambilan keputusan Instrumen meliputi enam materi yang dikembangkan oleh Young dan Shields, (1994) berkaitan dengan perilaku manajer akan kesadaran berbiaya dan keseluruhan item pertanyaan dirancang untuk menunjukkan pentingnya biaya. Skala Likert 1 sampai 5 digunakan untuk mengukur *Cost* . Skala 1 = sangat setuju sampai 5 =sangat tidak setuju. Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin rendah tingkat kesadaran berbiaya.

Tehnik Analisis

Uji Kualitas Data

Menurut Hair, *et al* (1998) kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Uji kualitas data untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Keterangan dari kedua uji kualitas data adalah sebagai berikut :

- Uji reliabilitas ditentukan dengan koefisien *cronbach alpha*. Suatu konstruk atas instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* di atas 0.60 (Hair *et al* , 1998).
- Uji validitas dengan uji person correlation. Jika hasilnya signifikan maka data dikatakan valid.

Uji Hipotesa

Untuk menguji hipotesa dalam penelitian ini menggunakan alat statistik yaitu teknik *Multivariate Struktur Equation Model (SEM)* dengan menggunakan software *LISREL 8.54*. Sebuah pemodelan SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari model pengukuran (*measurement model*) dan model structural (*structural model*). Model pengukuran ditujukan untuk mengkonfirmasi dimensi-dimensi yang dikembangkan pada sebuah faktor. Model structural adalah modal mengenai struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan kausalitas antar faktor (Augusty, 2002).

PEMBAHASAN DAN HASIL

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency theory timbul karena adanya dua pihak atau individu di dalam organisasi yang bertentangan kepentingannya masing-masing. Kedua pihak atau individu tersebut memiliki tujuan untuk memaksimalkan tingkat

kepentingannya masing-masing. Inti dari teori agensi adalah membentuk interaksi dari dua pemain atau lebih. Seringkali interaksi ini terjadi pada saat datangnya ketidakpastian dan informasi asimetris. Pihak-pihak yang terlibat dalam teori agensi disebut sebagai principal dan agen.

Principal mendelegasikan *responsibility decision making* kepada agen. Baik principal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang yang rasional dan semata-mata termotivasi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Filosofi teori keagenan (*agency theory*) dalam pemerintah daerah tercermin dalam hubungan antara Kepala Daerah dengan SKPD. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada SKPD selaku pejabat pengguna anggaran. Dalam kerangka teori agensi, Kepala Daerah bertindak sebagai principal dan pihak yang menerima wewenang (SKPD) sebagai agen yang akan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

Struktur Kewenangan Formal dan Penggunaan SIKD

Struktur kewenangan formal didefinisikan sebagai suatu pilihan yang sengaja diambil manajemen puncak untuk mendelegasikan tipe keputusan ke manajemen tingkat yang lebih rendah. Struktur organisasi biasanya menunjukkan kewenangan formal terkait dengan sistem pertanggungjawaban, pengaruh dan pengendalian yang didasarkan pada prinsip hirarki kewenangan. Dengan kata lain, kewenangan formal berhubungan dengan keputusan yang benar dan berhubungan dengan posisi pimpinan dalam mengatur struktur hirarkis (Barnard, 1968 dalam Abernethy dan Emidia, 2004).

Struktur kewenangan formal berhubungan dengan dua hal yaitu, penggunaan SIA dengan tujuan untuk pengendalian perilaku bawahan

(peran pengendalian) dan penggunaan SIA untuk memudahkan pengambilan keputusan (peran keputusan) di tingkat subunit. Jensen dan Meckling (1992) menyatakan bahwa SIA bermanfaat untuk penghubung kewenangan struktur formal dan peran pengendalian.

Kewenangan formal dalam pemerintah daerah dapat dilihat dari hak untuk pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pimpinan SKPD yang mana hak tersebut didapat dari pendelegasian seluruh atau sebagian hak pengambilan keputusan dari kepala daerah. Disisi lain pimpinan SKPD memiliki tanggungjawab atas wewenang yang didapat tersebut. Hak dan tanggungjawab serta sistem informasi keuangan pada pemerintah daerah lebih sering berhubungan dengan APBD yang dimulai dari penyusunan APBD sampai dengan pelaporan realisasi APBD yang akan disampaikan kepada kepala daerah. Atas dasar uraian tersebut, bila dihubungkan dengan penggunaan SIKD dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H1a : Struktur kewenangan formal berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan.

H1b : Struktur kewenangan formal berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan.

Struktur Kewenangan Informal dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Kewenangan informal didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok yang mempengaruhi keputusan organisasi dan aktivitas lain, yang tidak mendapatkan sanksi dalam sistem formal (Alexander dan Morlock, 2000). Keputusan informal terletak pada kemampuan atau keahlian seorang individu (atau sekelompok individu), dimana mereka berdiri diantara divisi (lembaga) dan kemampuan mereka untuk dapat mengendalikan sumber daya kritis sebuah

perusahaan (Freidson, 1975 dalam Abernethy & Emidia, 2004). Kewenangan informal bersumber dari kekuasaan individu atau koalisi.

Pada pemerintahan daerah, kewenangan informal seseorang dapat dilihat pada jabatan structural yang dimiliki, tingkat senioritas yang lebih tinggi, keahlian dalam bidang tertentu dan kedekatan dengan penguasa yang lebih tinggi. Kewenangan informal seringkali berperan cukup dominan dalam manajemen keputusan dengan tidak terdapat sanksi apapun bila salah dalam mengambil tindakan tertentu dalam manajemen keputusan. Kewenangan informal ini diterapkan oleh manajemen senior.

Kewenangan informal SKPD dimanifestasikan dalam kontrol signifikan mereka terhadap sumberdaya, meskipun mungkin secara formal hal ini tidak memungkinkan. Seringkali pimpinan SKPD menggunakan otoritas informal ini dengan mengabaikan pertimbangan kepala daerah. Ini sangat mungkin terjadi sebab kepala daerah hanya mempunyai pengetahuan yang terbatas atas situasi dan kondisi masing-masing SKPD. Ketidakterdapatnya orientasi manajerial akan berpengaruh negatif dengan penggunaan SIA untuk pengendalian keputusan dan manajemen keputusan. Berdasarkan argumentasi di atas dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H2a : Struktur kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan.

H2b : Struktur kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan.

Karakteristik Sistem Informasi Keuangan Daerah

Karakteristik SIKD ditinjau dari sudut pandang sejauh mana SIKD merupakan informasi yang tepat waktu, relevan, akurat dan format informasi

yang disajikan (Bowens dan Abernathy, 2000). Karakteristik SIKD merupakan kriteria penting bagi pimpinan SKPD dalam membuat keputusan dan mengontrol keputusan. Dalam pemerintah daerah, ketika pimpinan SKPD mempersepsikan bahwa informasi yang disediakan SIKD mampu menyediakan informasi yang tepat waktu, relevan, akurat dan formatnya juga baik, maka mereka akan menggunakan informasi tersebut untuk manajemen keputusan (Syafuruddin, 2006). Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian. Penelitian Abernathy dan Emedia, (2004) menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi untuk manajemen keputusan akan makin meningkat saat relevansi informasi juga meningkat. Penelitian Syafruddin (2006) menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara karakteristik SIKD dengan manajemen keputusan tetapi tidak signifikan dengan pengendalian keputusan. Atas dasar uraian ini, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3a : Karakteristik SIKD berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan.

H3b : Karakteristik SIKD berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan.

Perilaku Manajerial

Pemilihan dan keputusan penentuan rancangan SIKD diharapkan dapat berguna bagi manajemen, baik dalam manajemen keputusan maupun dalam pengendalian keputusan. Selanjutnya penggunaan SIKD ini diprediksi berdampak pada perilaku manajerial (kinerja) para pimpinan SKPD yang dalam penelitian ini diproksi dengan kepedulian *cost* (*cost consciousness*).

Manajemen keputusan merupakan perilaku manajer yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi yang dapat ditelaah dengan melihat sampai sejauh mana keberadaan informasi anggaran digunakan untuk manajemen keputusan (Swieringa dan Moncur, 1975 dalam Abernathy dan Emedia, 2004). Dalam pengambilan keputusan seorang manajer dituntut untuk menentukan letak masalah, mengidentifikasi alternatif-alternatif yang dapat mengoreksi masalah itu, mengevaluasi alternatif-alternatif dan memilih alternatif yang paling baik. Dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh SIKD, seorang manajer dituntut untuk bisa mengambil suatu keputusan yang tepat guna meningkatkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya.

Pengendalian keputusan merupakan perilaku manajer yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi dapat ditealaah dengan melihat sampai sejauh mana keberadaan anggaran dapat digunakan untuk pengendalian keputusan (Swieringa dan Moncur, 1975 dalam Abernathy dan Emedia, 2004). Informasi yang dihasilkan oleh SIKD, digunakan oleh seorang manajer untuk mengendalikan keputusan yang telah diambilnya. Dengan memiliki ketrampilan konseptual seorang manajer dapat memanfaatkan informasi selain manajemen keputusan tapi juga dapat mengendalikan keputusan yang telah dibuat.

Konsep kepedulian terhadap *cost* (*cost consciousness*) dikembangkan oleh Shield dan Young (1994). Konsep ini menekankan pada tingkat dimana para manajer mempunyai kaitan dengan konsekuensi biaya dari pengambilan keputusan, karena dalam jangka panjang, keputusan dan tindakan manajer menyebabkan biaya, kecuali manajer yang bisa membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk peduli terhadap biaya.

Berkaitan dengan struktur kewenangan dan *cost consciousness* terdapat dua hubungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang terjadi melalui SIKD. Penggunaan SIKD akan meningkatkan pentingnya *cost consciousness* bagi para manajer. Tujuan SIKD tersebut dapat memperkuat pentingnya sumber daya manajemen dan konsekuensi biaya dari pengambilan keputusan.

Rancangan dan bentuk struktur formal dirancang untuk mendorong dan memotivasi pimpinan SKPD untuk bertindak berdasar pada manajemen sumberdaya yang sehat dan benar (Abernethy dan Stoelwinder, 1995). Struktur otoritas informal yang melekat pada diri pimpinan SKPD yang diperoleh dan berasal dari kemampuan (kekuasaan) individunya dalam mempengaruhi pihak lain, lebih cenderung menghasilkan dampak negatif terhadap tingkat kepedulian *cost*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Syafruddin (2006). Atas dasar uraian ini dapat dinyatakan hipotesa sebagai berikut:

H4a : Penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*.

H4b : Penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*.

H5a : Struktur kewenangan formal berpengaruh positif langsung dengan pentingnya *cost consciousness*

H5b : Struktur kewenangan informal berpengaruh negatif langsung dengan konsekuensi *cost consciousness*

Uji kualitas Data

Uji kualitas data meliputi uji reliabilitas dan uji validitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* menggunakan **SPSS**. Suatu konstruk dikatakan *reliabel* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Nunanaly, 1967 dalam Imam, 2005). Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 1

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach</i>	Keterangan
<i>Alpha</i>			
1	Kewenangan Formal	0,796	Reliabel
2	Kewenangan Informal	0,811	Reliabel
3	Karakteristik SIKD	0,846	Reliabel
4	Manajemen Keputusan	0,710	Reliabel
5	Pengendalian Keputusan	0,781	Reliabel
6	Cost Consciousness	0,843	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2010

Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate (pearson correlation)* antara masing-masing skor indikator dengan skor konstruk. Suatu indikator pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Kisaran Korelasi	Signifikansi	Keterangan
1	Kewenangan Formal	0,862** - 0,888**	0,01	Valid
2	Kewenangan Informal	0,718** - 0,818**	0,01	Valid
3	Karakteristik SIKD	0,621** - 0,710**	0,01	Valid
4	Manajemen Keputusan	0,794** - 0,856**	0,01	Valid
5	Pengendalian Keputusan	0,782** - 0,840**	0,01	Valid
6	Cost Consciousness	0,736** - 0,806**	0,01	Valid

Sumber : Data diolah, 2010

** : Signifikan

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai regression weight pada kolom *CR (Critical Ratio)* yang dihasilkan dengan program *LISREL 8.54*. Nilai CR dibandingkan dengan nilai kritisnya 1,66 pada signifikansi 5%. Jika nilai CR hasil pengolahan data (*LISREL*) telah melampaui nilai kritisnya (t tabel) dengan tingkat signifikansi $P < 0,05$ maka hipotesis alternatif yang diajukan diterima.

Tabel 3
Hasil Analisis dan Interpretasi Paramater
Estimasi Model SEM dengan Signifikansi
Indikator

	STANDARDIZED	SE	t-Value	KEPUTUSAN
ESTIMATE				
MK ← KF	0,053	0,163	2,167	Signifikan
MK ← KI	0,143	0,154	0,925	Tidak Signifikan
MK ← KS	0,156	0,146	1,074	Tidak Signifikan
PK ← KF	0,188	0,148	1,272	Tidak Signifikan
PK ← KI	0,303	0,148	1,976	Signifikan
PK ← KS	0,111	0,139	0,802	Tidak Signifikan
CC ← MK	0,110	0,146	0,753	Tidak Signifikan
CC ← PK	0,093	0,134	0,694	Tidak Signifikan
CC ← KF	0,416	0,155	2,679	Signifikan
CC ← KI	0,133	0,141	0,948	Tidak Signifikan

Sumber : Data diolah, 2010

Keterangan :

- KF : Kewenangan Formal
- KI : Kewenang Informal
- KS : Karakteristik SIKD
- MK : Manajemen Keputusan
- PK : Pengendalian Keputusan
- CC : *Cost Consciousness*

Hipotesis 1a menyatakan bahwa struktur kewenangan formal berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan.. Hasil uji terhadap *structural equation* antara kewenangan formal dengan manajemen keputusan menunjukkan bahwa nilai dari kewenangan formal sebesar 2,167. Nilai tersebut signifikan pada skala 5%, karena nilai t tersebut lebih besar dari pada nilai kritisnya (1,66). Berdasarkan hal tersebut struktur kewenangan formal berpengaruh positif terhadap manajemen keputusan. Dengan demikian hipotesa 1a diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Luth dan Shields (2003), struktur kewenangan formal berpengaruh pada penggunaan SIA untuk memudahkan manajemen keputusan.

Hipotesis 1b menyatakan bahwa struktur kewenangan formal berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan. Nilai t dari hasil uji terhadap *structural equation* antara struktur kewenangan formal dengan

pengendalian keputusan sebesar 1,272. Nilai tersebut tidak signifikan pada skala 5%, karena nilai t dari *LISREL* lebih kecil dari pada t tabel (1,66). Dengan demikian hipotesa 1b ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Luth dan Shields (2003), struktur kewenangan formal berpengaruh pada penggunaan SIA untuk memudahkan pengendalian keputusan.

Hipotesis 2a menyatakan bahwa struktur kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan. Nilai t dari hasil uji terhadap *structural equation* antara struktur kewenangan formal dengan pengendalian keputusan sebesar 0,925. Nilai tersebut tidak signifikan pada skala 5%, karena nilai t dari *LISREL* lebih kecil dari pada t tabel (1,66). Dengan demikian hipotesa 2a ditolak. Berarti struktur kewenangan informal tidak berpengaruh negatif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan

Hipotesis 2b menyatakan bahwa struktur kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan. Nilai t dari hasil uji terhadap *structural equation* antara struktur kewenangan formal dengan pengendalian keputusan sebesar 1,976. Nilai tersebut signifikan pada skala 5%, karena nilai t dari *LISREL* lebih besar dari pada t tabel (1,66). Dengan demikian hipotesa 2b diterima. Berarti struktur kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan.

Pada pemerintahan daerah, kewenangan informal seseorang dapat dilihat pada jabatan structural yang dimiliki, tingkat senioritas yang lebih tinggi, keahlian dalam bidang tertentu dan kedekatan dengan penguasa yang lebih tinggi. Kewenangan informal seringkali berperan cukup dominan dalam manajemen keputusan dengan tidak terdapat sanksi apapun bila salah dalam mengambil tindakan tertentu dalam manajemen

keputusan. Kewenangan informal ini diterapkan oleh manajemen senior.

Hipotesis 3a menyatakan bahwa karakteristik SIKD berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan. Nilai t dari hasil uji terhadap *structural equation* antara karakteristik SIKD dengan pengendalian keputusan sebesar 1,074. Nilai tersebut tidak signifikan pada skala 5%, karena nilai t dari *LISREL* lebih kecil dari pada t tabel (1,66). Dengan demikian hipotesa 3a ditolak. Berarti karakteristik SIKD tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Syafruddin (2006) menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara karakteristik SIKD dengan manajemen keputusan.

Hipotesis 3b menyatakan bahwa karakteristik SIKD berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan. Nilai t dari hasil uji terhadap *structural equation* antara karakteristik SIKD dengan manajemen keputusan sebesar 0,802. Nilai tersebut tidak signifikan pada skala 5%, karena nilai t dari *LISREL* lebih kecil dari pada t tabel (1,66). Dengan demikian hipotesa 3b ditolak. Berarti karakteristik SIKD tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk struktur kewenangan formal keputusan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Syafruddin (2006) menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara karakteristik SIKD dengan pengendalian keputusan.

Hipotesis 4a menyatakan bahwa penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*. Nilai t dari hasil uji terhadap *structural equation* antara manajemen keputusan dengan *cost consciousness* sebesar 0,753. Nilai tersebut tidak signifikan pada skala 5%, karena nilai t dari *LISREL* lebih kecil dari pada t tabel (1,66). Dengan demikian hipotesa 4a ditolak. Berarti penggunaan SIKD

untuk manajemen keputusan tidak berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*.

Hipotesis 4b menyatakan bahwa penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*. Nilai t dari hasil uji terhadap *structural equation* antara pengendalian keputusan dengan *cost consciousness* sebesar 0,694. Nilai tersebut tidak signifikan pada skala 5%, karena nilai t dari *LISREL* lebih kecil dari pada t tabel (1,66). Dengan demikian hipotesa 4b ditolak. Berarti penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan tidak berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Abernethy & Vagonani (2004) yang menyatakan terdapat hubungan antara peran SIA dengan *cost consciousness*. Chairina (2006), menyatakan bahwa pengendalian keputusan dan manajemen keputusan berhubungan dengan *cost consciousness*.

Hipotesis 4c menyatakan bahwa struktur kewenangan formal berpengaruh positif langsung terhadap *cost consciousness*. Nilai t dari hasil uji terhadap *structural equation* antara kewenangan formal dengan *cost consciousness* sebesar 2,679. Nilai tersebut signifikan pada skala 5%, karena nilai t dari *LISREL* lebih besar dari pada t tabel (1,66). Dengan demikian hipotesa 4c diterima. Berarti struktur kewenangan formal berpengaruh positif langsung terhadap *cost consciousness*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chairina (2006) yaitu terdapat hubungan langsung antara struktur kewenangan formal dengan *cost consciousness*.

Hipotesis 4d menyatakan bahwa struktur kewenangan informal berpengaruh negatif langsung terhadap *cost consciousness*. Nilai t dari hasil uji terhadap *structural equation* antara kewenangan informal dengan *cost consciousness* sebesar 0,948. Nilai tersebut signifikan pada skala 5%, karena nilai t dari *LISREL* lebih besar dari

pada t tabel (1,66). Dengan demikian hipotesa 4d ditolak. Berarti struktur kewenangan informal tidak berpengaruh negatif langsung terhadap konsekuensi *cost consciousness*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur kewenangan formal berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan tapi tidak berpengaruh positif untuk pengendalian keputusan.
2. Struktur kewenangan informal tidak berpengaruh negatif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan. Struktur kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan.
3. Karakteristik SIKD tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan dan untuk pengendalian keputusan.
4. Penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan tidak berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*. Penggunaan SIKD untuk pengendalian keputusan tidak berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*. struktur kewenangan formal berpengaruh positif langsung terhadap *cost consciousness*. struktur kewenangan informal tidak berpengaruh negatif langsung terhadap konsekuensi *cost consciousness*.

Saran

1. Penelitian ini mempunyai implikasi yang luas di masa yang akan datang, khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan perilaku manajerial, yaitu dalam penggunaan sistem

untuk manajemen keputusan, pengendalian keputusan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Abernethy dan Emidia, *Power, Organization Design and Managerial Behaviour* (2004). Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan diteliti kembali dan perlu dikembangkan untuk meneliti faktor-faktor teknis. Hal ini disarankan karena faktor-faktor dalam penggunaan sistem bukan hanya dari faktor perilaku tapi juga teknis yang juga sangat berpengaruh. Penelitian ini juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya dengan memperluas obyek penelitian dengan memilih responden yang mempunyai jabatan yang setingkat supaya hasilnya dapat digeneralisaikan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan perilaku manajerial di Indonesia terutama yang berhubungan dengan pengguna sistem. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada pemda bahwa kesuksesan implikasi sistem tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan dana, namun pengguna sistem juga perlu diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albernethy, M. A., & Emidia Vagnoni (2004). *Power, Organization design and Managerial Behaviours Organizations*. Accounting, Organization and Society, 29, 207 – 225.
- _____, & Lilis, A. M. (2001). *Interdependencies In Organization Design : A Test In Hospitals*. Journal of Management Accounting Research, 13, 107 – 130.

- _____, & M. A., & Stoelwinder, J. U. (1995). *The Role of Professional Control In The Management of Complex Organizations*. *Accounting, Organization and Society*, 20 (1), 1 – 17.
- Alexander, J. A., & Morlock, L. L. (2000). *Power and Politics In Health Services Organizations, In Health Care Management : Organization Design And behaviour* (4th Ed). Albany, Ny : Thompson Learning.
- Augusty Ferdinan (2002), *Structure Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. BP UNDIP.
- Barnard, C. I. (1968). *The Function of the Executive (30th Anniversary Edition)*. Cambridge : Harvard University Press.
- Bouwens, J., & Abernethy, M. A. (2000). *The Consequences of Customization of Management Accounting System Design*. *Accounting, Organization and Society*, 24 (2), 221 – 241.
- Doll, W. J., & Torkzadeh (1988). *The Measurement of End – User Computing Satisfaction*. *MIS Quarterly*, 12 (2). 254-274.
- Govindarajan, V. (1988). *A Contingency Approach to Strategy Implementation at the Business – Unit Level : Integrating Administrative Mechanisms with Strategy*. *Academy of Management Journal*, 31 (4), 828 – 853.
- Hair, J.R, Anderson, R.E. Tarham, R.L. Beack, W.C. (1998). *Multivariate data Analysis*, Fifth Edition, Prentice Hall International Inc.
- Imam Ghozali (2001), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali (2004), *Structural Equation Modeling : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.54*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M.C. (1998). *Foundation of Organizational Strategy*. Cambridge, Ma : Harvard University Press.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1992). *Specific and General Knowledge and Organizational Structure*. In. L. Werin, & H. Wijkander (Eds), *Contract Economics*. Cambridge : Blackwell Publishers.
- Kurunma Ki, L. (1999). *Professional VS Financial Capital In The Eld of Health Care – Struggles For The Redistribution of Power and Control*. *Accounting Organization and Society*, 24 (2), 95 – 124.
- Luft, J., & Shields, M. (2003). *Mapping management accounting : making structural models from theory – based empirical research*. *Accounting Organizations and Society*, 28, 169 – 250.
- Milgrom, P., Roberts, J. (1992). *Economics, Organization and Management*. Englewood Cli. S, Nj : Prentice – Hall International.
- Muchamad Syafruddin, (2006). *Dampak Struktur Kekuasaan Pada Penggunaan SIKD Untuk Kontrol Keputusan Dan Manajemen Keputusan dan Perilaku Manajerial : Studi Pada Organisasi Pemerintah Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002), *Metodelogi Penelitian Bisnis*, BPFE Yogyakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia, No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.* Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Shields, M., & Young, S. M. (1994). Managing Innovation Costs : A Study of Cost Conscious behavior by R & D Professionals. *Journal of Management Accounting Research*, 6 175, 196.

Uma Sekaran (1992), *Research Methods For Business : A Skill Budding Approach*, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc.

Young, D. W., & Saltman, B. (1985). *The Hospital Power Equilibrium, Physician Behavior and Cost Control*. Baltimore : Johns Hopkins University.

Zimmerman, J. (1997). *Accounting for Decision Making and Control*. Boston : Irwin / McGraw Hill.